REVIU PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2018 - 2023



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK
Jl. Supryadi No. 5 Nganjuk Telp. / Fax. (0358) 328079
e-mail : kesbangpolkab.nganjuk@gmail.com

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....		i
Daftar Isi.....		ii
Daftar Tabel.....		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**.....	1
	1.1 Latar Belakang,,,,,,.....	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN .....**	9
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	31
BAB III	**PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**	36
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	36
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	36
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur	39
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	40
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	41
BAB IV	**TUJUAN DAN SASARAN**	43
BAB V	**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**.....	45
BAB VI	**PROGRAM, RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAN**	46
BAB VII	**INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**	64
	7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA	65
	7.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI	66
BAB VIII	**PENUTUP**.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Tenaga Berdasarkan Pangkat / Golongan dan Latar Belakang Pendidikan.....	22
Table T.C. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	27
Tabel T.C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	29
Tabel T.C.25	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
Tabel T.C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	45
Tabel T.C.27	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 – 2023.....	51
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	65
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	66

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penyusunan Rancangan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk telah terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Perubahan Rencana Strategis ini berisikan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan indikasi pendanaan dan sumber keuangannya dari sumber dana APBD. Secara formal penyusunan Renstra dibuat setelah diselesaikannya dokumen akhir RPJMD. Kegiatan ini ditujukan untuk finalisasi dokumen Renstra SKPD jangka 5 (lima) tahun yang merupakan acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam merumuskan program pembangunan tahunannya dan terkait dengan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan pelayanan serta menunjang Visi dan Misi Bupati.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk kesempurnaan penyusunan.

Nganjuk, 26 Desember 2022

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

IMAM ASHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670614 198902 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik, merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, termasuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Selanjutnya Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJMD.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Perangkat Kerja untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Berdasarkan hal tersebut maka, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah termasuk dinamika berkembangnya aspirasi masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum :
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815) ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan rencana kerja SKPD;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk ini adalah :

1.3.1. MAKSUD

1. Dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018-2023.
2. Sebagai kerangka acuan dalam rangka menumbuhkan komitmen di dalam organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk ke arah pencapaian tujuan organisasi.

1.3.2. TUJUAN

1. Agar program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tetap berkelanjutan, fleksibel dalam mengikuti tuntutan perubahan situasi dan kondisi yang ada.

2. Agar pelaksanaan setiap program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam mencapai tujuan organisasi selalu berpedoman pada Rencana Strategis yang mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Tupoksi yang telah ditetapkan, sehingga kinerjanya dapat teratur dan tercapai dengan baik.
3. Sebagai tolok ukur Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Tahunan.
4. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan
4.2 Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA
7.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, Kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama pelaksanaan pembangunan daerah. Penciptaaan kondisi daerah yang aman, tertib, dan tenteram menjadi isu utama pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Di sisi kelembagaan, kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk berdasarkan Peraturan Daerah No 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. TUGAS

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas dan kewajiban dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1.2. FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

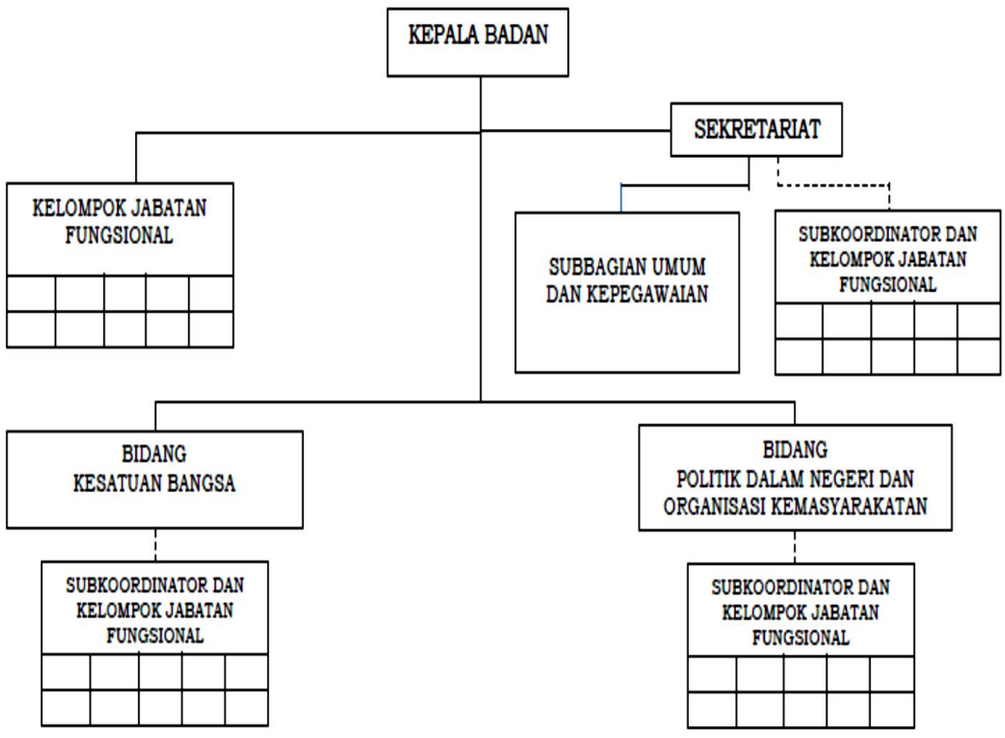
e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan tiugasnya.

2.1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Nganjuk berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

(Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022)



2.1.4. KEPALA BADAN

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1.5. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. melaksanakan urusan administrasi surat-menyurat dan kehumasan pengelolaan tata naskah dinas;
b. melaksanakan koordinasi hubungan masyarakat dan keprotokolan;

c. melaksanakan pengelolaan administrasi barang dan aset/inventaris kantor dan kerumahtanggaan;
d. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan di bidang ketatausahaan, administrasi perlengkapan, aset, kerumahtanggaan dan kepegawaian;
f. menyusun laporan kegiatan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan ketatalaksanaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5. Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Bidang Kesatuan Bangsa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan

penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik ;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik ;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik ;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan

perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik ;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.6. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,

perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah ASN dan Tenaga Lepas Harian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Desember 2022 sebanyak 21 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 12 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 9 orang Tenaga Harian Lepas (THL) . Dari 21 orang pegawai tersebut, sebanyak 15 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

Tabel : Jumlah Tenaga Berdasarkan Pangkat/Golongan dan LatarBelakang Pendidikan

a. Jumlah PNS / CPNS / THL Menurut Golongan

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Golongan IV/e	Orang	-
	Golongan IV/d	Orang	-
	Golongan IV/c	Orang	-
	Golongan IV/b	Orang	1
	Golongan IV/a	Orang	1
2	Golongan III/d	Orang	5
	Golongan III/c	Orang	-

	Golongan III/b	Orang	-
	Golongan III/a	Orang	2
3	Golongan II/d	Orang	2
	Golongan II/c	Orang	-
	Golongan II/b	Orang	1
	Golongan II/a	Orang	-
4	Golongan I/d	Orang	-
	Golongan I/c	Orang	-
	Golongan I/b	Orang	-
	Golongan I/a	Orang	-
5	Tenaga Harian Lepas (THL)	Orang	9
JUMLAH		**Orang**	**21**

b. Pejabat Struktural

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Eselon II	Orang	-
2	Eselon III	Orang	2
3	Eselon IV	Orang	1
JUMLAH		**Orang**	**3**

c. Pejabat Fungsional

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Perencana Ahli Muda	Orang	1
2	Analis Kebijakan	Orang	3
JUMLAH		**Orang**	**4**

d. Staf PNS

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Golongan IV	Orang	-
2	Golongan III	Orang	2
3	Golongan II	Orang	3
4	Golongan I	Orang	-
JUMLAH		**Orang**	**5**

Menurut pendidikan formal, penjenjangan dan diklat :

e. Pendidikan Formal

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Lulusan SD	Orang	-
2	Lulusan SLTP	Orang	-
3	Lulusan SLTA	Orang	3
4	Lulusan D-I	Orang	-
5	Lulusan D-II	Orang	-
6	Lulusan Sarmud/D-III	Orang	-
7	Lulusan S-1	Orang	8
8	Lulusan S-2	Orang	1
9	Lulusan S-3	Orang	-
JUMLAH		**Orang**	**12**

2.2.2 SARANA PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai yang terdiri dari :

No.	Jenis sarana	Jumlah (Unit)
1.	Kendaraan Roda Empat	2
2.	Komputer	9
3.	Printer	8
4.	Laptop	4
6	AC	7
7	Mesin Absensi	1
8	Kursi Rapat	30
9	Kursi Biasa	45
10	Lemari	7
11	Sofa	2
12	Meja Rapat	1
13	Rak Buku	1
14	Rak Kayu	1
15	Meja	27
16	Sepeda Motor	6

2.3 KINERJA PELAYANAN

Kinerja Pelayanan SKPD Realisasi program, kegiatan, dan capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam lima tahun periode Renstra SKPD Tahun 2018-2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang diarahkan untuk mewujudkan rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjaga rasa kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika demi tercapainya NKRI yang kuat dan tangguh, pemahaman tentang pentingnya HAM melalui berbagai kegiatan yaitu : Pembinaan Forum

Pembauran Kebangsaan, Pembinaan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Pembinaan Kerukunan Umat Beragama. Adapun Hasil Yang dicapai:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB di Kabupaten Nganjuk sebagai wadah dalam penyelesaian beberapa permasalahan / konflik yang timbul di tengah masyarakat yang berlatar belakang Agama dan Kepercayaan diantaranya konflik pendirian tempat ibadah umat nasrani di lingkungan masyarakat muslim di kecamatan Sawahan, Tanjunganom, Baron dan Loceret. Permasalahan mengenai pendirian tempat ibadah umat nasrani di lingkungan masyarakat muslim ini sangatlah rawan terjadi konflik. Untuk itu pemerintah daerah memberikan fasilitasi melalui pendekatan dialog / duduk bersama dengan masyarakat muslim sekitar dan pimpinan gereja hingga tercapai kesepakatan bersama. Hingga saat ini berlangsung kondusif dan aman.
2. Adanya Dialog Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Nganjuk sebagai upaya cegah dini, dari potensi terpecah belahnya kondisi sosial masyarakat karena Perbedaan Suku, Ras, Agama, golongan serta Perbedaan Politik sehingga mampu menciptakan situasi masyarakat yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Nganjuk. Tercapainya keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis.
3. Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan menumbuhkan sikap cinta tanah air, nasionalisme dan bela negara bagi pemuda, pelajar dan masyarakat sehingga menciptakan rasa nasionalisme bagi generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tercapainya persatuan dan

kesatuan bangsa sehingga disintegrasi bangsa dapat dicegah. Menumbuhkan jati diri di kalangan generasi penerus bangsa melalui penanaman nilai moral, etika, kejujuran, kompetensi dan nilai nilai kebangsaan.

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nganjuk

	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK		Target	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Target IKK	Indikator	Perangkat Daerah Tahun Ke-					Tahun Ke-					Tahun Ke-				
No.				Lainnya															
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Peresentase penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	-	-	-	65%	70%	85%	85%	90%	67%	67%	75%	-	-	103%	96%	88%		
2	Persentase masyarakat/lembaga yang meningkat Wawasan Kebangsaannya		√	-	70%	75%	80%	80%	85%	70%	76%	80%	-	-	100%	101%	100%		

Berdasarkan Tabel T.C-23 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pelaksanan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk telah menunjukkan peningkatan hasil atas pelaksanaan pelayanan kinerja utamanya pada pelayanan publik yaitu pada tahun ke-1 (2019) berupa penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat Kabupaten Nganjuk. Konfik sosial tersebut diantaranya hasil Pilkades Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo, unjuk rasa pembangunan jalan tol di kawasan Kecamatan Bagor. Namun kasus tersebut dapat ditangani dengan baik dan lancar. Beberapa faktor keberhasilan hal ini karena :

a. Koordinasi lintas sektor yang berjalan dengan baik.
b. Kerja sama yang baik dengan masyarakat untuk ikut serta menciptakan situasi daerah yang kondusif dan harmonis.
c. Tersedianya data dan informasi yang akurat sehingga kasus segera dapat terselesaikan.

Selanjutynya di sisi lain ada satu kasus yang belum tertangani dengan baik yaitu kasus pemilihan Kepada Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo. Hal ini berdampak pada situasi kehidupan masyarakat di desa tesebut yang semakin resah. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap masalah tersebut adalah minimnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa, sehingga tingkat kesenjangan antara pemerintah desa dengan warga masyarakat terjadi.

Tabel T.C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelyanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nganjuk

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi					Rasio					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Kesatuan Bangsa dan Politik	2.000.000.000	2.773.586.167	2.137.715.614	-		1.914.430.457	2.116.576.065	1.967.927.112	-	-	96%	76%	92%			8%	1,77%

Berdasarkan Tabel T.C 24 diatas dapat dijelaskan bahwa :

Pelaksanaan Program/Kegiatan di Kantor Kesbangpol pada tahun 2018 dan 2020 dirasa masih tertinggal dengan OPD lainnya. Hal ini juga dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

- Adanya Pandemi Covid-19 yang menerapkan system kerja Work From Home (WFH) sehingga kinerja dari pegawai dan juga penyerapan anggaran tidak maksimal.
- Sering terjadi pergantian pengelola anggaran sehingga ketika terjadi penggantian dengan pengelola yang baru masih harus banyak belajar memahami mekanisme maupun aturan yang berhubungan dengan tugas pengelola keuangan.
- Kecepatan dan kerja sama lintas sektor belum optimal.

Namun, pada tahun 2021 telah menunjukkan adanya peningkatan penyerapan anggaran yaitu sebesar 92%. Beberapa Program yang meunjukan peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.137.715.614,- terealisasi sebesar Rp. 1.967.927.112,- Hal ini karena :
   - Koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama antar bidang/seksi berjalan dengan baik dan lancar.
   - Kepatuhan dalam menaaati prosedur atau mekanisne yang ada di lingkup Badan Kesbangpol.
   - Kecepatan implementasi tugas secara cepat dan tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional yang diarahkan melalui berbagai kegiatan yaitu Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Peningkatan Peran dan Efektifitas Korpimda dalam Penanganan Konflik di Kabupaten Nganjuk, Peningkatan Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing di Kabupaten Nganjuk.

Hasil Yang Dicapai :

1 Terciptanya situasi keamanan yang kondusif melalui Kegiatan Cegah Dini dan Kewaspadaan Dini Di Kabupaten Nganjuk melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang melibatkan Toga, Tomas di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

2 Melalui Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) didukung Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah maupun Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), situasi keamanan di Kabupaten Nganjuk kondusif, aman dan terkendali .

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Untuk menyusun suatu formulasi rencana stratejik yang merupakan perwujudan pandangan ideal yang hendak dicapai sangat dibutuhkan penguasaan informasi tentang masalah-masalah dalam lingkungan internal dan eksternal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk yang relevan dengan fokus partisipasi politik masyarakat, pengembangan wawasan kebangsaan dan Hak Asasi Manusia serta pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Kehidupan masyarakat Kabupaten Nganjuk pada umumnya bergerak di bidang sektor pertanian dan peternakan, terutama masyarakat yang berada di wilayah perdesaan dengan jumlah 264 desa dan 20 kelurahan yang tersebar di 20 Kecamatan menunjukkan masih perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah terhadap kondisi sosial dan pola kehidupan masyarakat didesa dan kelurahan sebagai akibat dari berbagai krisis sosial yang dipacu oleh kondisi perekonomian dan moneter yang belum menentu sampai saat ini.

Adapun sasaran yang ingin dicapai disini adalah untuk mencermati kekuatan dan kelemahan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk meliputi faktor peluang dan tantangan eksternal yang mempengaruhi, sehingga dapat dilakukan antisipasi menghadapi perubahan-perubahan di masa datang yang lebih bersifat inovasi dan perbaikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki dalam rangka menuju tujuan (keadaan yang diinginkan).

Dalam lima tahun terakhir, secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Nganjuk terus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tersebut meliputi :

1. Meningkatnya dalam menyusun kebijakan dan petunjuk teknis dan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dan adanya landasan hukum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama berbagai unsur antara lain : badan, dinas, Badan, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta, dan unit unit kerja lainnya terkait untuk memperlancar tugas dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Meningkatnya penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan kegiatan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang semakin baik.
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi

Namun demikian, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain :

a Minimnya dana operasional dikarenakan anggaran yang berasal dari APBD untuk kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk belum maksimal karena ada penetapan skala prioritas kegiatan.

b Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai yang menjadi inventaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk yang belum lengkap.

c Kurangnya staf yang spesialis analisis strategis yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam hal penyusunan Program.

e Data base yang kurang lengkap

Hal tersebut dilihat dari Jenis data-data tentang :

- Keberadaan ormas/LSM/Orsospol/OrganisasiKeagamaan/yayasan
- Kejadian-kejadian tentang upaya-upaya yang mengganggu suasana IPOLEKSOSBUD di wilayah Kabupaten Nganjuk
- Masih belum optimal dan perlu penertiban dalam mengelola administrasinya

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganiuk dalam waktu lima tahun kedepan diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewuiudkan pelayanan prima yang berkualitas. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka akan terwujud pelayanan yang berkualitas. Untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan lima tahun ke depan tidak lagi sering terjadi perubahan peraturan penyelenggaraan kegiatan yang bergerak dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik agar pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari peraturan yang akan diterbitkan.
2. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme, perencanaan dan kredibilitas institusi perencana.
4. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan unit perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia perencana terhadap penguasaan keahlian *(skill)* fungsional perencanaan dan penyusunan program yang sesuai tugas pokok dan fungsi.
6. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan kegiatan yang bergerak dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam penyusunan perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adanya harapan kedepan untuk bisa maju diantaranya adalah :

1. Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai ujung tombak di Kabupaten Nganjuk dalam menciptakan kondisi stabilitas daerah yang kondusif dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Mewujudkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang efektif, dan efisien sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
3. Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat menjadi arah kebijakan dan pedoman yang efektif dalam rangka pelaksanaan kebijakan daerah dalam Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Adanya proses partisipatif dan transparansi dalam penyusunan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kondisi yang aman dan kondusif merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu partisipasi semua pihak dalam menciptakan dan menjaga kondusifitas daerah Kabupaten Nganjuk sangat diperlukan. Namun demikian untuk mencapai kondisi tersebut, masih terdapat permasalahan yang harus diatasi antara lain permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini adalah :

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan deteksi dini terjadinya konflik sosial.
2. Rendahnya jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk memelihara nilai-nilai kebangsaan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

VISI

Visi merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Visi harus memiliki pandangan jauh ke depan, ke arah mana dan bagaimana Kabupaten Nganjuk akan dibawa. Visi berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan. Visi menjadi arah dan tujuan dalam mengelola berbagai potensi daerah oleh Pemerintah Daerah yang dibangun secara terpadu, sinergis dan produktif. Visi Pemerintah Kabupaten Nganjuk di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 adalah :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT"

Pernyataan visi tersebut dicapai dengan mengerahkan dan mengelola seluruh potensi sumber daya di Kabupaten Nganjuk dengan motto Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho. Motto ini dibangun untuk menyatukan gerak langkah dan semangat bersama pemerintah dan masyarakat untuk membangun daerah dari pinggiran atau perdesaan yang merupakan basis sumber daya Kabupaten Nganjuk. Sinergi gerak ini akan mampu menjadikan kekuatan besar yang harmonis antara pemerintah dan seluruh masyarakat sehingga mampu mewujudkan daerah yang Maju dan Bermartabat, terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang hakiki, merata dan berkelanjutan. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- **Terwujudnya,** terkandung upaya dan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat yang dilandasi semangat bersama untuk membangun dan mengembangkan potensi lokal dalam mempercepat pembangunan daerah.
- **Maju,** suatu keadaan/kondisi masyarakat yang memiliki sikap, cara berpikir dan bertindak dengan daya saing tinggi untuk menggali, melaksanakan dan mengembangkan pembangunan daerah, sehingga menjadi contoh bagi daerah lain.
- **Martabat** bahwa masyarakat Kabupaten Nganjuk merupakan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia dan etika yang luhur sebagai landasan etos kerja dalam membangun daerah. Hasil pembangunan Nganjuk akan memberi contoh dan inspirasi bagi daerah lain dalam membangun.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat dinamis dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Memperkuat kinerja birokrasi, bersih, professional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkuaitas.
4. Meningkatkan keberpihakan Pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi teknologi tepat guna.
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Berdasarkan atas Misi Kabupaten Nganjuk diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu OPD yang bertanggung jawab melaksanakan **Misi 1** : "*Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban" yang* **bertujuan** meningkatkan harmoni hidup sosial masyarakat yang religius, harmonis dan dinamis berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa **sasaran** yang akan dicapai meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tertib, tentram dan religius.

Adapun **strategi** untuk mewujudkan misi 1 diatas, antara lain dengan meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial dan koordinasi kewaspadaan dini daerah dengan **arah kebijakan** meningkatkan peran serta elemen masyarakat menuju tercapainya kondisi daerah yang nyaman dan kondusif.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN / LEMBAGA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra SKPD Kabupaten terhadap terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah Kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusam Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk melaksanakan Progam dan Kegiatan telah sesuai dengan progam dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023 dirumuskan sebagai berikut :

1. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan melestarikan nilai – nilai kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur.
2. Membangun hubungan positif konstruktif antar dan antara lembaga infra dan supra struktur politik, pemerintah dan masyarakat dalam berdemokrasi melalui fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif.

3. Mengembangkan dan mensosialisasikan arti penting Kewaspadaan Nasional kepada Aparatur dan Masyarakat untuk memperkuat NKRI.
4. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis, jujur dan adil dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Memperkuat peran ormas sebagai perwujudan masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis dalam rangka mewujudkan pembangunan dan demokrasi yang lebih baik.
7. Membangun kewaspadaan daerah sebagai upaya kesiapan dan kesiagaan yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemahaman HAM di jajaran aparatur pemerintah dan masyarakat, kemampuan pemahaman terhadap masalah dan strategi pemecahan masalah guna menghindari terjadinya konflik yang berdampak pada disintegrasi bangsa.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 ditegaskan bahwa Lingkup muatan Rencana Tata Ruang Wilayah mencakup pengawasan penataan ruang. Dan berdasarkan Pasal 5 huruf i, bahwa pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan ruang melalui pengaturan izin

serta pemantapan sistem kelembagaan ruang. Upaya mewujudkan stabilitas sosial politik, persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan energi yang besar dan terencana.

Dalam perkembangan dewasa ini, harus diakui masih selalu ada pihak-pihak yang menginginkan adanya perpecahan dan konflik sosial atas nama suatu kepentingan tertentu. Mereka tidak ingin melihat negara Indonesia yang aman dan tenteram. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya merealisasikan visi dan misi dalam mengatasi permasalahan aktual di masyarakat yang berkaitan dengan pembinaan mental, pendidikan politik dan menumbuhkan jiwa Patriotisme/Nasionalisme. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam rangka menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang adaptif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Untuk itu perlu adanya strategi. Guna mencapai strategi tersebut, maka diperlukan identifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi berhasilnya tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Melihat permasalahan yang berkembang saat ini di Kabupaten Nganjuk yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Isu-isu Strategis sebagai berikut:

a. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal dasar suksesnya pembangunan Nasional.
b. Rendahnya semangat Nasionalisme yang masih menghinggapi masyarkat serta pemahaman, pengamalan dan penghayatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Meningkatknya pengaruh era pasar bebas yang masuk dalam warga masyarakat terutama masalah Ideologi bangsa yang harus diwaspadai dengan melibatkan peran aktif segenap elemen baik Instansi Pemerintah, masyarakat dan Ormas/LSM untuk melakukan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik dari dalam maupun luar negeri.
d. Kondisi stabilitas sosial politik sangat penting bagi terciptanya tali persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN

Dalam Renstra 2018 – 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk telah menetapkan tujuan organisasi sebagai upaya strategis menuju langkah perbaikan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah “Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib dan religius”.

4.2. SASARAN

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah “meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif”. Sasaran tersebut ditandai dengan indikator Persentase Penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama.

Tabel T–C 25.
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN AWAL 2018	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib dan religius	Meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif	Peresentase penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	62,52%	65%	70%	85%	85%	90%

BAB V
STATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel T.C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat			
Misi I RPJMD : Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib dan religius	Meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif	Meningkatkan koordinasi penangangan konflik sosial dan koordinasi kewaspadaan dini daerah.	Meningkatkan peran serta elemen masyarakat menuju terciptanya kondisi daerah yang nyaman dan kondusif.

BAB VI
PROGRAM, RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAN

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023, maka perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri dari Kegiatan

1. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

   Terdiri dari Sub Kegiatan :

   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

   Terdiri dari Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   c. Koordinasasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

   Terdiri dari Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan.

4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

   Terdiri dari Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   b. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
   c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   d. Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Terdiri dari Sub Kegiatan :

   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Terdiri dari Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah**, terdiri dari Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Program ini terdiri dari Kegiatan :

1. **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan** terdiri dari Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

III. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Program ini terdiri dari Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Pengembangan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Pengembangan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Pengembangan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Pengembangan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Program ini terdiri dari Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

Terdiri dari Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Terdiri dari Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahangunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

VI. PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Terdiri dari Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Tabel T.C. 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk

Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indkator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mewujudkan kesadaran, pemahaman dan pengamalan Nilai-nilai Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, bernegara dan beragama	Meningkatkan sikap saling menghormati, menghargai toleransi dan tenggang rasa intern dan antar umat beragama	Persentase konflik sosial yang tetangani	Badan Kesatuan Bangsa, Politik								

			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi Perkantoran	80%	80%	280.467.000	80%	322.663.700	Kes bangpol	Kes bangpol
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses	370 surat	370 surat	280.467.000	400 surat	308.513.700	Kesbangpol	Kesbangpol
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan telepon, listrik dan internet	5500 kwh listrik, 2 buah telepon dan 2 mbps internet	11000 kwh listrik, 2 buah telepon dan 20 mbps internet	1.500.000	11000 kwh listrik, 2 buah telepon dan 20 mbps internet	1.650.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan Kantor	1 orang petugas kebersihan	1 orang petugas kebersihan	50.000.000	1 orang petugas kebersihan	55.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Kebutuhan ATK	35 jenis ATK	35 jenis ATK	26.400.000	35 jenis ATK	36.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	5 jenis cetak, 14.000 lbr penggandaan	5 jenis cetak, 14.000 lbr penggandaan	20.000.000	5 jenis cetak, 14.000 lbr penggandaan	25.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	3 jenis bahan bacaan	3 jenis bahan bacaan	5.000.000	3 jenis bahan bacaan	5.500.000	Kesbangpol	Kesbangpol

			7. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	mamin harian, rapat, tamu 11 bulan	mamin harian, rapat, tamu 11 bulan	4.000.000	mamin harian, rapat, tamu 11 bulan	5.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			8. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar derah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	22 orang	22 orang	19.067.000	22 orang	20.973.700	Kesbangpol	Kesbangpol
			9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan	22 orang	22 orang	130.000.000	22 orang	150.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			10. Pengadaan peralatan dan bahan pembersih	Jumlah kebutuhan peralatan dan bahan pembersih	16 jenis peralatan	16 jenis peralatan	20.000.000	16 jenis peralatan	25.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana Kantor yang layak pakai	80%	80%	4.500.000	80%	5.500.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	2 unit roda	4 unit roda	75.000.000	0	50.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			2.Pemeliharaan rutin / berkala gedung Kantor	Jumlah kebutuhan untuk pemeliharaan	25 jenis untuk pemeliharaan	25 jenis untuk pemeliharaan	90.000.000	25 jenis untuk pemeliharaan	99.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol

				rutin / berkala gedung Kantor							
			3.Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kebutuhan untuk pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	2 mobil dinas / operasional	2 mobil dinas / operasional	60.000.000	2 mobil dinas / operasional	66.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			4.Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung Kantor	Jumlah kebutuhan untuk pemeliharaan rutin / berkala peralatan peralatan gedung Kantor	29 unit	29 unit	15.000.000	29 unit	16.500.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			5. Penambahan daya listrik	Besaran kebutuhan daya listrik	-	-	-	110000 kwh	40.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			6. Rehabilitasi sedang / berat gedung Kantor	Luas tempat yang direhabilitasi gedung Kantor	100 m2	0	150.000.000	-	100.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			7. Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gaedung Kantor	-	6 jenis peralatan	57.000.000	80%	60.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			8. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	-	6 jenis perlengkapan	47.000.000	80%	50.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol

				gedung Kantor							
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	-	-	-	80%	18.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			1. Penyediaan Seragam Dinas Harian bagi ASN	Jumlah Seragam Dinas Untuk ASN	-	-	-	30 kain	10.500.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			2. Penyediaan Seragam Olah Raga	Jumlah Seragam Olah Raga	-	-	-	30 stel pakaian olah raga	7.500.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			3 Pelaksanaan Penyediaan Biaya Instruktur Senam	Jumlah Instruktur Senam	-	-	-	4 kali / bulan	9.600.000	Kesbangpol	Kesbangpol
					-	-	-	80%	10.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
					-	-	-	80%	10.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
					100%	100%	16.000.000	100%	17.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1 dok	10.000.000	1 dok	11.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			2. Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol

			4. Penyusunan LKJIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			5. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1 dok	3.000.000	-	-	Kesbangpol	Kesbangpol
			6. Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			7. Penyusunan LPPD Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			8. Penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			9. Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			10 Penyusunan LKPJ Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
					80%	80%	640.000.000	80%	1.060.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
					80%	90%	225.000.000	95%	247.500.000	Kesbangpol	Kesbangpol
					80%	80%	250.000.000	85%	275.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
					-	-	-	80%	75.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
					-	-	-	80%	100.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
					80%	80%	125.000.000	80%	137.500.000	Kesbangpol	Kesbangpol
					80%	80%	40.000.000	85%	75.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
					-	-	-	80%	150.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
					-	-	-	90%	140.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
					80%	80%	249.329.950	80%	165.500.000	Kesbangpol	Kesbangpol
					90%	90%	144.329.950	-	-	Kesbangpol	Kesbangpol
					100%	100%	15.000.000	100%	16.500.000	Kesbangpol	Kesbangpol

					-	-	-	85%	40.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			4. Forum Diskusi Politik	Terselenggaranya kegiatan diskusi politik	80%	80%	40.000.000	80%	44.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
			5. Peningkatan Etika dan Budaya Poltik bagi Masyarakat	Terselenggaranya sosialisasi Peningkatan Etika dan Budaya Politik Bagi Masyarakat	80%	80%	40.000.000	85%	45.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol

Tabel T.C. 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk

Tahun 2018- 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					2021		2022		2023					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya stabilitas kondisi sosial,tentram, tertib dan religius	Meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif	Persentase Penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	85%	**2.137.715.614**	90%	**2.268.759.780**	95%	**3.401.188.459**	95%	**7.899.190.189**	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perengkat Daerah yang disusun**	85%	21.000.000	95%	22.250.000	4 Laporan	34.765.625	4 Laporan	79.515.625	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85%	21.000.000	95%	22.250.000	4 Laporan	34.765.625	4 Laporan	79.515.625	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	90%	1.698.998.800	95%	1.655.820.464	3 dokumen	2.624.685.624	3 dokumen	2.624.685.624	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90%	1.690.799.000	95%	1.647.620.664	15 org/bln	2.611.873.436	15 org/bln	6.002.524.436	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	90%	999.800	95%	999.800	1 Laporan	1.562.188	1 Laporan	3.561.788	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	90%	7.200.000	95%	7.200.000	16 Laporan	11.250.000	16 Laporan	25.650.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen kepegawaian yang disiapkan**	90%	-	95%	6.360.000	2 dokumen	39.937.500	2 dokumen	52.657.500	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90%	-	95%	6.360.000	1 paket	9.937.500	1 paket	22.657.500	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Bimbungan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0%	-	0%	-	20 orang	30.000.000	20 orang	30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					2021		2022		2023					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan**	85%	118.997.530	95%	136.347.030	4 dokumen	235.050.828	4 dokumen	521.830.388	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85%	39.556.010	95%	48.868.510	5 paket	68.642.203	5 paket	161.441.723	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	85%	10.301.520	95%	10.192.520	3 paket	16.096.125	3 paket	36.590.165	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	85%	6.000.000	95%	6.000.000	5 dokumen	9.375.000	5 dokumen	21.375.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85%	63.140.000	95%	71.286.000	36 Laporan	140.937.500	36 Laporan	302.423.500	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang disediakan**	85%	38.958.334	95%	52.231.336	1 dokumen	60.872.397	1 dokumen	152.062.067	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85%	38.958.334	95%	52.231.336	4 unit	60.872.397	4 unit	152.062.067	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah dokumen Penyediaan Barang dan Jasa yang disediakan**	85%	83.665.800	95%	110.685.800	3 dokumen	130.727.813	3 dokumen	325.079.413	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85%	1.080.000	95%	1.130.000	1 laporan	1.687.500	1 laporan	3.897.500	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	85%	42.600.000	95%	66.000.000	3 laporan	66.562.500	3 laporan	175.162.500	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85%	39.985.800	95%	43.555.800	2 laporan	62.477.813	2 laporan	146.019.413	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda yang disediakan**	85%	176.095.150	95%	285.065.150	3 Jenis	275.148.672	3 Jenis	736.308.972	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	85%	64.863.600	95%	64.853.600	8 unit	101.349.375	8 unit	231.066.575	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85%	11.000.000	95%	13.000.000	20 unit	17.187.500	20 unit	41.187.500	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	85%	100.231.550	95%	207.211.550	1 unit	156.611.797	1 unit	464.054.897	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev	85%	89.129.450	85%	209.457.950	90%	289.309.297	90%	683.925.197	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev**	85%	89.129.450	85%	209.457.950	300 orang	289.309.297	300 orang	683.925.197	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					2021		2022		2023					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	85%	85.769.450	85%	206.097.950	300 orang	284.059.297	300 orang	671.955.197	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan SejarahKebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	85%	3.360.000	85%	3.360.000	3 laporan	5.250.000	3 laporan	11.970.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah dan yang dimonev	85%	1.538.187.400	85%	1.719.345.900	90%	2.403.417.813	90%	5.660.951.113	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	**Jumlah partai poltik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah dan yang dimonev**	85%	1.538.187.400	85%	1.719.345.900	10 partai	2.403.417.813	10 partai	5.660.951.113	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	85%	54.999.900	85%	236.158.400	250 orang	85.937.344	250 orang	377.095.644	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	85%	1.482.227.500	85%	1.482.227.500	10 partai	2.315.980.469	10 partai	5.280.435.469	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					2021		2022		2023					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	85%	960.000	85%	960.000	3 laporan	1.500.000	3 laporan	3.420.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang menerima Hibah dan yang dimonev	85%	665.959.800	85%	705.766.550	90%	1.040.562.188	90%	2.412.288.538	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Jumlah ormas yang menerima bantuan hibah dan yang dimonev**	85%	665.959.800	85%	705.766.550	6 ormas	1.040.562.188	6 ormas	2.412.288.538	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	85%	664.999.800	85%	704.806.550	6 ormas	1.039.062.188	6 ormas	2.408.868.538	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	85%	960.000	85%	960.000	3 laporan	1.500.000	3 laporan	3.420.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev	85%	28.139.000	85%	55.959.960	90%	87.437.500	90%	199.357.460	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev	85%	28.139.000	85%	55.959.960	100 orang	87.437.500	100 orang	199.357.460	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	85%	27.179.000	85%	54.999.960	100 orang	85.937.500	100 orang	195.937.460	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					2021		2022		2023					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	85%	960.000	85%	960.000	3 Laporan	1.500.000	3 Laporan	3.420.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	85%	593.760.000	85%	1.118.909.900	90%	1.242.062.500	90%	2.706.932.400	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	85%	593.760.000	85%	1.118.909.900	90%	1.242.062.500	90%	2.706.932.400	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	85%	592.800.000	85%	1.117.949.900	150 orang	540.562.500	150 orang	2.003.512.400	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	85%	960.000	85%	960.000	3 laporan	1.500.000	3 laporan	3.420.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	0%	-	0%	-	12 dokumen	700.000.000	12 dokumen	700.000.000		

BAB VII
INDIKATOR PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan sosial politik sehingga Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut :

TABEL 7.1

Indikator Kinerja Utama

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kabupaten Nganjuk (Periode 2018-2023)

NO	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
			Thn-0 2018	Thn -1 2019	Thn -2 2020	Thn -3 2021	Thn -4 2022	Thn -5 2023	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Peresentase penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	Konflik yg tertangani / Konflik yg terjadi x 100%	62,52%	65%	70%	85%	85%	90%	90%

7.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicators* (KPI) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut :

TABEL 7.2

Indikator Kinerja Kunci

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kabupaten Nganjuk (Periode 2018 – 2023)

	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
			Thn-0 2018	Thn -1 2019	Thn -2 2020	Thn -3 2021	Thn -4 2022	Thn -5 2023	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Persentase masyarakat / lembaga yang meningkat Wawasan kebangsaan -nya	Lembaga/masyarakat yg mengikuti pembinaan / Jml Target Lembaga/ masyarakat X 100%	62,52%	70%	75%	80%	80%	85%	85%

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

Indikator kinerja tersebut diatas merupakan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah; sasaran dan tujuan bagi aparatur. Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Kabupaten Nganjuk sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

BAB VIII
PENUTUP

Dengan penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian di bidang kemasyarakatan dan pembangunan. Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu, diharapkan aparatur, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen ini.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan komitmen dari seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dengan jiwa korsa *(l'esprit de corps*), rasa ikut memiliki (*sense of belonging*), rasa ikut bertanggung jawab (*sense of responsibility*), pemikiran skeptis dengan metode ilmiah, jiwa visioner dalam menatap masa depan yang akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk ini, dapat dijadikan suatu pedoman dalam kinerja, dasar dari pelaksanaan tugas. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap publik. Tentunya dalam penyusnan Renstra ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran demi penyempurnaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023.

Nganjuk, 26 Desember 2022
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

IMAM ASHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670614 198902 1 002